

## IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL PERPUSTAKAAN (SNP 008:2017) PADA STANDAR KOLEKSI DAN SARANA PRASARANA DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PADANG

### Implementation of the National Library Standards (SNP 008:2017) for Collection and Infrastructure Standards at the Library and Archives Office of Padang City

Fitri Zurini & Gustina Erlianti

Universitas Negeri Padang

Fitrizurini00@gmail.com; gustinaerlianti@fbs.ac.id

#### Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jul 13, 2024	Jul 16, 2024	Jul 19, 2024	Jul 22, 2024

#### Abstract

The purpose of this study is to describe how the implementation of national library standards on collection standards and infrastructure facilities at the Padang City Library and Archives Service based on the National Library Standards (SNP 008:2017). The method used in the research is the descriptive method, with a qualitative type of research. The background of the research was carried out at the Padang City Library and Archives Office located in Gor Haji Agus Salim Padang. Data entry to be done obtained from interviews and documentation that the author will do directly at the Padang City Library and Archives Office. The selection of informants was carried out by purposive sampling techniques Data collection techniques used interviews, and documentation. The results of this study show that (1) the collection standard that has not met the standard is the type of library collection because for the type of collection in the form of Electronics and recorded works do not exist yet, for the number of library collections is sufficient However, for the procurement of collections has not been carried out in accordance with the national library standards because they are

constrained by the budget, the up-to-date collections have also not met the standards because there are still many collections published in the old year, the development of collections has not been in accordance with standards because there have never been re-shuffling activities, the procurement of library materials has not been carried out according to standards because they are constrained by The budget, the up-to-date collection has also not met the standards because many collections published in the old year are still used, the development of collections has not been in accordance with standards because there have never been re-opening activities, the procurement of library materials has not been carried out according to standards because of budget constraints, the preservation of collections has not been in accordance with standards because there are no tools that can be used for collection preservation, and the processing of library materials has been carried out in accordance with standards national libraries.

**Keywords:** Impregnation, Collection Standards, National Library Standards

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi standar nasional perpustakaan pada standar koleksi dan sarana prasarana di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan (SNP 008:2017). Metode yang digunakan pada penelitian yaitu metode deskriptif, dengan jenis penelitian kualitatif. Latar penelitian dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang yang berlokasi di Gor Haji Agus Salim Padang. Entri data yang akan dilakukan diperoleh dari wawancara dan dokumentasi yang akan penulis lakukan langsung di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling Teknik pengumpulan data menggunakan cara wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa standar koleksi yang belum memenuhi standar adalah jenis koleksi perpustakaan karena untuk jenis koleksi dalam bentuk elektronik dan karya rekam belum ada, untuk jumlah koleksi perpustakaan sudah mencukupi namun, untuk pengadaan koleksi belum dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan karena terkendala oleh anggaran, kemutakhiran koleksi juga belum memenuhi standar karena masih banyak menggunakan koleksi terbitan tahun lama, pengembangan koleksi belum sesuai standar karena tidak pernah dilakukan kegiatan cacah ulang, pengadaan bahan pustaka belum dilakukan sesuai standar karena terkendala oleh anggaran, pelestarian koleksi belum sesuai dengan standar karena tidak adanya alat yang bisa digunakan untuk pelestarian koleksi, dan untuk pengolahan bahan perpustakaan sudah dilakukan sesuai dengan standar nasional perpustakaan

**Kata Kunci:** Impelemntasi, Standar Koleksi, Standar Nasional Perpustakaan

## PENDAHULUAN

Pada zaman yang serba maju ini, pendidikan sangat lah penting, karena pendidikan merupakan dasar dari generasi suatu bangsa. Salah satu sumber ilmu pengetahuan adalah perpustakaan. Perpustakaan umum menjadi salah satu perpustakaan yang ditujukan untuk masyarakat luas sebagai wadah yang menghimpun dan menyebarluaskan berbagai jenis informasi kepada masyarakat dalam segala tingkatan tanpa terkecuali. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang merupakan salah satu perpustakaan umum yang bertujuan menyediakan informasi yang ada di perpustakaan sehingga dapat menjadi tempat belajar

sepanjang hayat khususnya bagi masyarakat Kota Padang. Agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang harus mampu menyediakan semua kebutuhan para pemustakanya terutama pada koleksi perpustakaan.

Pada tanggal 27 Maret 2017 Standar Nasional Perpustakaan (SNP) untuk perpustakaan Umum Kabupaten/Kota No. 008 Tahun 2017 telah disusun langsung oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Standar Nasional Perpustakaan berfungsi sebagai acuan pendirian, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan yang berlaku secara nasional. Peraturan Kepala Perpustakaan RI No. 8 Tahun 2017 tentang SNP Kabupaten/Kota tersebut memuat didalamnya standar koleksi perpustakaan, standar sarana dan prasarana perpustakaan, standar layanan perpustakaan, standar staf perpustakaan, standar penyelenggaraan perpustakaan, dan standar pengelolaan perpustakaan (Maulinda & Sahidi, 2022).

Berdasarkan hasil observasi awal ditemukan beberapa permasalahan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang terkhusus pada bagian koleksi. Koleksi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang masih banyak menggunakan koleksi tahun lama, hal ini juga diperkuat dari hasil wawancara dengan para pemustaka, dimana mereka tidak menemukan koleksi yang sesuai dengan yang mereka butuhkan. Perpustakaan tersebut juga tidak pernah melakukan kegiatan cacah ulang (*stock opname*), pengadaan bahan pustaka juga tidak berjalan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP 008:2017) karena terkendala oleh anggaran yang tidak mencukupi.

Melalui data awal yang didapat oleh peneliti maka Standar Nasional Perpustakaan (SNP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang patut untuk dipertanyakan apakah sudah sesuai standar yang telah ditetapkan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui keadaan sebenarnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pedoman Standar Nasional Perpustakaan (SNP) 2017. Dalam hal ini peneliti mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan (SNP) khusus perpustakaan umum kabupaten/kota yaitu SNP 008:2017.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini diberi judul “Implementasi Standar Nasional Perpustakaan (SNP 008:2017) Pada Standar Koleksi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang”. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti bagaimana Implementasi Standar Koleksi Perpustakaan berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan (SNP 008:2017) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang.

## **METODE**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode yang berusaha mengungkapkan suatu permasalahan dari keadaan yang sebenarnya. Penelitian ini dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang. Perpustakaan tersebut terletak di Gor Haji Agus Salim Padang. Entri data yang akan dilakukan diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumen. Kehadiran peneliti ialah untuk mendapatkan informasi yang berguna bagi penelitian. Pemilihan informan pada penelitian ini dilakukan dengan cara atau teknik *purposive sampling* yaitu salah satu cara memperoleh informan dengan mempertimbangkan bahwa orang tersebut adalah orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang akan diteliti (Sugiyono, 2019). teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengabsahan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik triangulasi sumber. Teknik analisis data yang dilakukan adalah reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, maka akan di uraikan pembahasan tentang implementasi Standar Nasional Perpustakaan No 008 Tahun 2017 pada Standar Koleksi dan Sarana Prasarana Perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang.

### **1. Implementasi Standar Koleksi Perpustakaan**

#### **a. Jenis Koleksi**

Berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan terdapat beberapa jenis koleksi yang harus ada di perpustakaan diantaranya adalah karya cetak, rekam, dan karya dalam bentuk elektronik. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang belum sepenuhnya menerapkan Standar Nasional Perpustakaan untuk jenis koleksi. Menurut Eskha (2018) sebagai salah satu pusat informasi maka perpustakaan harus menyediakan jenis koleksi lebih dari satu seperti karya umum, filsafat, ensiklopedi, juga terdapat koleksi majalah, koran ataupun artikel yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi. Berdasarkan pendapat tersebut maka perpustakaan harus mampu menerapkan Standar Nasional Perpustakaan dalam penyelenggaraannya. Namun, kenyataannya Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang belum sepenuhnya memenuhi Standar Nasional Perpustakaan No 8 Tahun 2017.

### **b. Koleksi Per Kapita**

Berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan jumlah koleksi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang sudah sesuai Standar Nasional Perpustakaan. Jumlah koleksi saat ini terdata sebanyak 38.335 untuk seluruh jenis koleksi yang ada di perpustakaan tersebut. Namun, untuk pengadaan bahan pustaka belum sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan karena kurangnya dana yang akan digunakan untuk pengadaan bahan pustaka tersebut. Pemenuhan standar koleksi harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan pemustaka, karena kebutuhan pemustaka menjadi prioritas utama dalam pengadaan koleksi perpustakaan, jumlah koleksi yang lengkap dan up to date menjadi salah satu tolak ukur perpustakaan dapat dikatakan baik (Rifauddin, Halida, & Nurma, 2020). Dari pernyataan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa untuk jumlah koleksi perpustakaan sudah dapat dikatakan memenuhi standar nasional perpustakaan. Namun, untuk pengadaan bahan perpustakaan belum dijalankan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

### **c. Kemutakhira Koleksi**

Berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota, koleksi yang terbit tiga tahun terakhir harus sebanyak 5% dari koleksi yang tersedia di perpustakaan tersebut. Namun, dari hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa saat ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang sebagian besar masih memuat koleksi terbitan tahun lama. Komponen yang sangat penting dalam sebuah perpustakaan adalah koleksi. Koleksi perpustakaan merupakan modal utama bagi perpustakaan dan menjadi daya tarik bagi pemustaka untuk berkunjung ke perpustakaan, karena informasi yang dibutuhkan pemustaka terdapat pada koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan. Menurut Kusumaningtyas, M., & Arya, D. (2013) koleksi yang tersedia di perpustakaan tidak hanya tergantung kepada banyaknya jumlah dan keragaman jenis koleksi yang dimiliki namun juga harus ditinjau dari kebutuhan pemakainya dan kemutakhirannya.

Oleh karena itu setiap perpustakaan harus bisa menyediakan koleksi sesuai dengan pedoman yang disediakan serta koleksi perpustakaan perlu untuk terus berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dari penjelasan sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa kemutakhiran koleksi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang belum sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan No 8 Tahun 2017.

#### **d. Pengembangan Koleksi**

Berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan kegiatan cacah ulang bahan pustaka (*stock opname*) dan penyiangan koleksi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun. Kegiatan cacah ulang adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana keadaan koleksi perpustakaan yang terdapat di rak, setelah itu koleksi perpustakaan akan dihitung kembali. Untuk penyiangan koleksi sendiri dilakukan dengan memilah-milah koleksi tidak layak pakai yang terdapat di rak. Jika kegiatan penyiangan koleksi tidak dilakukan maka akan menyebabkan koleksi perpustakaan menua, tidak menarik, dan semakin sulit untuk digunakan.

Perpustakaan dituntut harus bisa menyediakan koleksi yang berkualitas bagi para pemustakanya. Karena kepuasan masyarakat adalah hal yang paling utama bagi setiap perpustakaan. Selain itu, menurut Rahma (2021) penyiangan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara mengeluarkan bahan pustaka yang mengalami kerusakan, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pemustaka, kurang dimanfaatkan oleh pemustaka, dan adanya peraturan yang melarang bahan pustaka untuk dipakai dari koleksi yang terdapat di rak. Uwandu and Okere (2022) juga mengungkapkan bahwa penyiangan adalah penarikan atau pembuangan materi informasi yang sudah tidak lagi digunakan atau sudah jarang dipakai oleh para pemustaka dan ini dapat disebabkan karena adanya keterbatasan ruang, tampilan fisik buku, keusangan, dan jarang dimanfaatkan. *Stock opname* merupakan kegiatan penghitungan ulang koleksi perpustakaan dan bertujuan untuk mengetahui jumlah rill atau jumlah nyata koleksi di perpustakaan perpustakaan (Wince, 2017).

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang belum pernah melakukan kegiatan cacah ulang (*stock opname*) sedangkan untuk penyiangan sudah dilakukan. Oleh karena itu maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang belum sepenuhnya mengimplementasikan Standar Nasional Perpustakaan No. 008 Tahun 2017.

#### *d. Pengadaan Bahan Perpustakaan*

Berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan, Perpustakaan Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perpustakaan yaitu, jika jumlah penduduk sampai dengan 200.000 maka alokasi anggaran paling sedikit Rp. 500.000.000 per tahun, sedangkan jika jumlah penduduk > 200.000 maka alokasi anggaran sebesar @Rp. 2500.- per kapita per tahun. Pengadaan bahan perpustakaan bisa didapatkan melalui pembelian, hadiah atau sumbangan, tukarmenukar, titipan, dan terbitan sendiri. Menurut Darmanto (2018)

pengadaan bahan pustaka adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh para pengelola perpustakaan dalam mengumpu(l)kan dan memilah bahan pustaka yang masih bisa digunakan oleh penggunanya sebagai sumber informasi. Tujuan dilakukannya kegiatan ini agar koleksi yang disediakan perpustakaan merupakan koleksi yang memadai, berkualitas, dan juga koleksi yang dapat memenuhi kebutuhan para pemustaka.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang belum sepenuhnya melakukan kegiatan pengadaan bahan pustaka karena terkendala oleh anggaran yang tidak mencukupi. Oleh karena itu maka dapat disimpulkan bahwa implemementasi pengadaan bahan perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang belum sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan No 8 Tahun 2017.

e. *Pengolahan Bahan Perpustakaan*

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang telah melakukan kegiatan pengolahan bahan perpustakaan dengan cara pengorganisasian yang berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan. Menurut Darmanto (2018) pengolahan bahan pustaka merupakan suatu kegiatan yang bertujuan agar semua buku dapat terorganisir dengan baik dan teratur sehingga bisa dikelompokkan sesuai dengan ciri-ciri dan isi yang terkandung didalam buku dengan tahapan yang dimulai dari kegiatan inventarisasi buku, klasifikasi buku, katalogisasi buku, dan yang terakhir *shelving*. Kesuma, M. E. K., Yunita, I., & Meilani, F. (2021) juga mengatakan bahwa tahapan pengolahan bahan pustaka dimulai dari deskripsi bibliografi yang didalamnya terdapat judul buku, pengarang, edisi, kota terbit, tahun terbit, penerbit, deskripsi fisik, judul seri, daftar pustaka, ISBN, tahap selanjutnya yaitu menentukan tajuk entri utama, entri tambahan, nomor klasifikasi, dan membuat katalog yang dibuat 3 kartu yang harus diketik satu persatu.

Pengolahan bahan pustaka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang dilakukan dari kegiatan inventarisasi buku, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan cara pemeriksaan bahan pustaka, pengelompokan bahan pustaka, pengecapan, dan yang terakhir pencatatan. Kemudian setelah dilakukan kegiatan inventarisasi langkah selanjutnya ialah dilakukan kegiatan klasifikasi yang berpedoman pada *Dewey Decimal Classification* (DDC). Selanjutnya dilakukan kegiatan pengentrian data bibliografi buku ke aplikasi *inlislite*. Langkah selanjutnya, yaitu menempel barcode pada buku yang telah di entri. Dan yang terakhir dilakukan kegiatan *shelving* yaitu kegiatan dengan cara mengelompokkan koleksi berdasarkan jenis keloksi, dan setelah itu buku yang telah dikelompokkan akan disusun di rak sesuai dengan nomor *Dewey*

*Decimal Classification* (DDC) dari yang terkecil hingga terbesar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengolahan bahan pustaka pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang sudah mengimplementasikan Standar Nasional Perpustakaan.

**f. Pelestarian Bahan Perpustakaan**

Berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan pelestarian bahan pustaka dilakukan dengan cara perawatan buku dalam rentang waktu tertentu dan melaksanakan perbaikan pada buku yang rusak. Menurut Buang, M. (2018), pelestarian atau preservasi bahan pustaka adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menghambat kerusakan bahan pustakan dan menjadikan bahan pustaka tersebut menjadi lebih awet dan dapat bertahan lama, kegiatan pelestarian bahan pustaka ini tidak hanya terfokus pada fisik saja tetapi juga strategis dalam segi perbaikan dan perlindungan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan pelestarian bahan pustaka, baik itu dalam pemeliharaan ataupun dalam perbaikan bahan pustaka. Dari hasil wawancara yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang belum melaksanakan perbaikan koleksi seperti laminating, ataupun perbaikan dalam bentuk yang lain, sama halnya dalam pemeliharaan bahan pustaka. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang belum mengimplementasikan Standar Nasional Perpustakaan pada Pelestarian bahan perpustakaan.

**2. Kendala yang dihadapi dalam implementasi standar nasional perpustakaan (SNP 008:2017) pada standar koleksi dan sarana prasarana di dinas perpustakaan dan kearsipan kota padang**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang mengalami berbagai kendala dalam mengimplementasikan standar nasional perpustakaan (SNP 008:2017) pada standar koleksi dan sarana prasarana di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Padang diantaranya.

*Pertama*, jenis koleksi yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang masih menggunakan koleksi dalam bentuk karya cetak saja, untuk karya rekam dan karya dalam bentuk elektronik belum ada. Setiap perpustakaan seharusnya mempunyai koleksi karya rekam dan karya dalam bentuk elektronik juga karena hal ini dapat meningkatkan kualitas sebuah perpustakaan, disamping itu juga dapat memberikan kemudahan bagi para pemustaka dalam memperoleh informasi yang mereka butuhkan.

*Kedua*, koleksi perkapita di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kota Padang untuk jumlahnya sudah sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan, namun untuk penambahan koleksi belum dilakukan sesuai dengan Standar yang ditetapkan. Hal ini karena adanya hambatan dari anggaran yang diberikan.

*Ketiga*, kemutakhiran koleksi, setiap perpustakaan harus mempunyai koleksi minimal 5% adalah terbitan tiga tahun terakhir. Namun, kenyataannya Dinas Perpustakaan dan Kearsipana Kota Padang masih banyak menggunakan koleksi terbitan tahun lama. Faktor penyebab tidak terlaksananya kemutakhiran koleksi tersebut adalah karena keterbatasan anggaran yang ada.

*Keempat*, pengembangan koleksi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang belum pernah melaksanakan kegiatan cacah ulang (*stoke opname*) hal ini menyebabkan masih banyak koleksi di rak yang masih terbitan tahun lama.

*Kelima*, pengadaan bahan pustaka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang belum dilakukan secara maksimal karena kurangnya anggaran untuk pengadaan bahan pustaka, hal ini menyebabkan banyak buku yang tidak ditemukan oleh pemustaka yang sesuai dengan kebutuhan informasinya.

*Keenam*, pelestarian bahan pustaka tidak dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan seperti penjilidan cover yang rusak, laminating dan kegiatan pelestarian lainnya hal ini karena tidak adanya alat untuk kegiatan tersebut.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, jenis koleksi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang hanya memiliki jenis koleksi dalam bentuk karya cetak saja. *Kedua*, koleksi per kapita sudah memncukupi Standar Nasional Perpustakaan. Namun, untuk penambahan koleksi belum dilakukan secara maksimal. *Ketiga*, kemutakhiran koleksi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang belum memenuhi Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota (SNP 008: 2017). *Keempat*, pengembangan koleksi tidak sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota (SNP 008: 2017). *Kelima*, pengadaan bahan pustaka tidak sesuai Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/ Kota (SNP 008: 2017). *Keenam*, pelestarian bahan pustaka di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang dalam melaksanakan perbaikan bahan pustaka seperti penjilidan

buku yang rusak, laminating, dan fumigasi belum dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota (SNP 088: 2017).

## DAFTAR PUSTAKA

- Buang, M. (2018). Pelestarian bahan pustaka di museum balaputera dewa Sumatera Selatan. *IQRA: Jurnal Perpustakaan dan Informasi*, 12(1), 99-114.
- Darmanto, Priyono. (2018). *Manajemen Perpustakaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Eskha, A. (2018). Peran Perpustakaan Sebagai Sumber Belajar. *Jurnal Imam Bonjol: kajian ilmu informasi dan perpustakaan*, 2(1), 12-18.
- Kaharudin, R. G., & Zulaikha, S. R. (2022). Penyiangan Koleksi Perpustakaan Umum Sebagai Dedikasi dan Tanggungjawab Pustakawan. *Anuva: Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi*, 6(3), 255-268.
- Kesuma, M. E. K., Yunita, I., & Meilani, F. (2021). Penerapan Aplikasi SLiMS Dalam Pengolahan Bahan Pustaka Di Perpustakaan Perguruan Tinggi. *Jurnal Adabiya*, 23(2), 248.
- Kusumaningtyas, M., & Arya, D. (2013). Pengaruh Ketersediaan Koleksi Perpustakaan Terhadap Tingkat Kunjungan Pemustaka di Perpustakaan Institut Teknologi Nasional. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 13(3), 2.
- Rahman, M. M. (2015). Mengaktifkan perpustakaan sekolah. *LIBRARIA: Jurnal Perpustakaan*, 3(2), 181-199.
- Rifauddin, M., & Nurma, H. A. (2020). Evaluasi Koleksi Bahan Pustaka di Perpustakaan. *Jurnal Adabiya*, 20(2), 35-45.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Diakses tanggal 27 Desember 2023 dari [Perka 8 2017 SNP Perpustakaan Kab Kota Salinan.pdf \(perpusnas.go.id\)](#)
- Uwandu, L., & Okere, C. (2022). In books: COLLECTION DEVELOPMENT IN LIBRARIES. Chapter 4, 74-89, ISBN: 978-978-53654-3-6.
- Wince, E. (2017). Kajian pentingnya stock opname dalam pengembangan koleksi perpustakaan. *Tik Ilmu: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 1(1), 79-88.